

**PELAKSANAAN PASAL 9 PERATURAN BUPATI JOMBANG
NO 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (STUDI DI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**BIMA RIDHO HALIM.P
NIM. 115010107111064**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PASAL 9 PERATURAN BUPATI NO 14
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (STUDI DI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Bima Ridho Halim.P
b. NIM : 115010107111064
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan

Disetujui pada tanggal : 1 Februari 2016

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, SH., M.Hum
NIP. 1960081011986011002

Pembimbing Pendamping



Agus Yulianto, SH., M.Hum
NIP. 195907171986011001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., M.Hum
NIP. 1960081011986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 9 PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (STUDI DI DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG)**

Oleh :
BIMA RIDHO HALIM, P
115010107111064

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 09 Oktober 2017

Pembimbing Utama



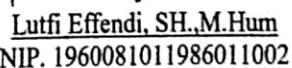
Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 1960081011986011002

Pembimbing Pendamping



Agus Yulianto, SH.,M.Hum
NIP. 195907171986011001

Ketua bagian Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP. 1960081011986011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 125/Plagiasi/FH/2016

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : BIMA RIDHO HALIM.P
NIM : 115010107111064
Judul : PELAKSANAAN PASAL 9 PERATURAN BUPATI NO. 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELA ISANAAN SISTEM VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU.

(Studi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahn selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai tanda mestinya.

Malang, 4 Februari 2016

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Priliyati, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Bima Ridho Halim Perdana
Nama Panggilan : Bima
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 3 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tetap : JL. Empu Panuluh No 27, RT 001/RW 008, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang
No Telepon : Handphone : 081216023899
Email : bimarido@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- 2011 - 2016 : Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum. Program Srata-1
- 2008 - 2011 : SMAN 2 Jombang
- 2005 - 2008 : SMPN 2 Jombang
- 1999 - 2005 : SD Negeri Jatipelem 1 Jombang
- 1997 - 1999 : TK Pertiwi Jatipelem Jombang

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT, yang karena Rahmat, Nikmat, dan KaruniaNYA yang tiada henti diberikan kepada penulis hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, yakni dengan selesainya penulis skripsi ini.

Terima Kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT atas rahmat, ridho, rezeki, barokah dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW atas kecintaan beliau terhadap umatnya sehingga kini dunia terasa lebih indah.
3. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Utama, atas waktu bimbingannya dan dukungannya.
5. Bapak Agus Yulianto, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu bimbingannya dan dukungannya.
6. Ibu Sayeng, Mas Maman, Serta Bapak Ibu Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang telah memberi izin dan memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ayahanda Mohammad Syaifudin dan ibunda tercinta Ribut Widarti yang telah memberikan dukungan lahir dan batin, memberikan doa serta menguatkan dengan cinta kepada penulis.
8. Adekku tercinta Sukma Idam terima kasih atas semangat dan dukungannya.

9. Keluarga besarku dari keluarga ayah maupun ibu untuk kedua eyangku terima kasih untuk doanya, dan juga tidak lupa kepada om, tante, pakde, budhe terima kasih juga untuk semangat dan doanya kepada penulis.
10. Teman diskusi teman-teman angkatan 2011 terima kasih untuk semua bantuannya sehingga penulis mendapat pencerahan dalam penulisan skripsi ini.

Aakhirnya, Wal'afwu minkum, Jazakumullah khairan katsiir

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian agar lebih baiknya penulis kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya seperti yang penulis dan pembaca harapkan.

Malang, Februari 2016

Penulis

**PELAKSANAAN PASAL 9 PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (STUDI DI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG)**

Bima Ridho, SH, Lutfi Effendi, S.H,M.Hum., Agus Yulianto, S.H M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : bimarido@gmail.com

Instagram : Instagram.com/@bimarido

Abstrak

Penelitian ini membahas persoalan pelaksanaan SVLK di Kabupaten Jombang. Tujuan adanya peraturan tentang SVLK ini adalah untuk mengurangi adanya illegal logging, meningkatkan kesadaran para industri kayu tentang pentingnya legalitas kayu, dan untuk membantu para pengusaha membantu usahanya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain pertama, Bagaimana Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang No 14 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ? Kedua, Apa kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang No 14 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ? Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan bupati, Kebijakan publik, dan SVLK.

**THE ENFORCEMENT OF ARTICLE 9 REGENTS JOMBANG ORDINANCE NUMBER
14 YEAR 2015 ON GUIDANCE FOR THE ENFORCEMENT OF LUMBER LEGALITY
SYSTEM VERIFICATION (STUDY IN THE
DEPARTMENT OF FORESTRY AND PLANTATION
DISTRICT JOMBANG)**

Bima Ridho, SH, Lutfi Effendi, S.H,M.Hum., Agus Yulianto, S.H M.Hum

Faculty of Law University of Brawijaya

Email : bimarido@gmail.com

Instagram : Instagram.com/@bimarido

Abstract

This study addresses the question of the enforcement lumber legality system verification. The purpose of regulation about enforcement lumber legality system verification are to reduce the presence of illegal logging, the timber industry to increasw awareness about the importance of timber legality, and to help employers xpand the business. Based on the things above, the authors raised the formulation of the problem, among others, first, How do the enforcement of Article 9 Regent Jombang Ordinance Number 14 year 2015 on Guidance for Timber Legality Verification System?. Secondly, What are the constraints and completion in the enforcement of Article 9 of the Regent Jombang Ordinance Number 14 year 2015 on Guidance for Timber Legality Verification System? The enforcement is quite good, although there are constraints in enforcement.

Keywords: Implementation, regulations regents, Public Policy, lumber legality system verification

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Studi Di Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Jombang)” ini dapat saya selesaikan.

Skripsi ini saya buat sebagai kewajiban untuk memenuhi tugas. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang dalam kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka demi terwujudnya Skripsi ini. Akhirnya saran dan kritik pembaca yang dimaksud untuk mewujudkan kesempurnaan skripsi ini penulis sangat hargai.

Malang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Abstraksi.....	viii
Abstrac	ix
Daftar Gambar	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan	14
B. Konsep Kebijakan.....	15
1. Kebijakan Publik.....	15
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
3. Tujuan Kebijakan.....	17
4. Jenis Kebijakan Publik.....	17
5. Proses Kebijakan Publik	18
C. Konsep Peraturan Bupati.....	20
1. Pengertian Peraturan bupati	20
2. Proses Pembentukan Perda Kabupaten.....	20
3. Daftar Rancangan Perda Kabupaten	21

4. Program Penyusunan Perda Kabupaten	21
D. Konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).....	22
1. Ruang Lingkup.....	21
2. Pengertian SVLK	22
3. Tujuan SVLK.....	23
4. Standar Verifikasi Legalitas Kayu	24
5. Kelembagaan Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	26
6. Proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	27
7. Dokumen-Dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit SVLK	
.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Metode Pendekatan.....	32
C. Alasan Pemilihan Lokasi	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Populasi dan Sampel.....	35
G. Teknik Analisis Data	36
H. Definisi Operasional	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang	38
2. Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.....	41
B. Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan SVLK	56
C. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan SVLK	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penelitian Sebelumnya.....	8
Gambar 2. Peta Kabupaten Jombang	39
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang	44

